

**RE – ORIENTASI STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM KONTEKS
PENCAPAIAN VISI MISI INDONESIA 2030**

Zulgani

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi,
Kampus Pinang Masak

ABSTRACT

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang pernah mengalami krisis ekonomi dan krisis multidimensional yang sangat pelik dipenghujung dasawarsa 90-an, Indonesia pada saat ini tengah berjuang untuk melepaskan diri dari pengaruh negatif krisis ekonomi dimaksud. Krisis ekonomi yang meluluh lantakkan sendi – sendi dasar struktur ekonomi, struktur kelembagaan, struktur pemerintahan dan struktur sosial yang telah dibangun sejak kurun waktu setengah abad belakangan ini, diupayakan untuk dinetralisir dan diatasi dengan berbagai kebijakan baik yang terkait dengan bidang ekonomi maupun bidang – bidang lain seperti bidang sosial, kelembagaan, manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan, politik, kemasyarakatan, keamanan, hubungan internasional, dan termasuk pula kebijakan yang terkait dengan pemilihan dan penetapan strategi pembangunan yang dianggap cocok dan relevan.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia paling tidak telah menghadirkan berbagai petaka diantaranya adalah : 1. Indonesia terjebak dalam perangkap stagnasi pembangunan ekonomi dengan kapasitas finansial yang semakin berkurang dan melemah. 2. Indonesia kembali terpuruk dan terperosok, kemudian terdegradasi dari kelompok negara – negara berpendapatan menengah (middle income country) menjadi negara berpendapatan rendah ditambah dengan predikat negara

miskin penghutang terbesar (highly indebted poor country). 3. Indonesia menjadi semakin kurang bijak dan kurang mampu dalam me – manage (mengelola) perekonomiannya, dan menjadi bulan – bulanan model ekonomi globalisasi dan menjadi koban dari strategi neo liberalisme, apalagi setelah Indonesia memutuskan dan menghentikan kerjasama dengan IMF dalam hal restrukturisasi ekonomi pasca krisis. 4. Indonesia menjadi negara yang kurang berperan dalam mengatur dan memelihara keseimbangan serta dalam menumbuhkan kembangkan pembangunan ekonomi yang adil dan bermartabat baik dalam perspektif regional maupun global. 5. Indonesia menjadi salah satu negara dengan karakter potensi sumberdaya alam semakin terkuras dan mulai menjurus pada terbentuknya negara marjinal (marginal country). 6. Indonesia mengalami banyak kesulitan dalam hal mengembangkan ketata kelolaan pemerinatahan dan kelembagaan pembangunan sehingga menimbulkan banyak inefisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya dan sumber dana baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Dampak negatif krisis ekonomi dan krisis multidimensional tersebut menimbulkan banyak guncangan terhadap kerangka makro pembangunan nasional yang pada gilirannya akan berdampak pula pada dinamika kehidupan masyarakat

secara keseluruhan. Dalam kurun waktu satu dasawarsa belakangan ini, upaya – upaya untuk membangun kepercayaan (trust) terus dikumandangkan agar Indonesia dengan potensi dan kekuatan yang tersisa dapat bangkit kembali dan melakukan konsolidasi total untuk menciptakan momentum positif bagi perbaikan dan reformasi total terhadap seluruh komponen kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah awal yang dirumuskan oleh pemerintah pada dasarnya dimulai dari tahap pemulihan (recovery), kemudian dilanjutkan dengan tahap stabilisasi sebagai pijakan utama untuk masuk dalam pertumbuhan atau perkembangan dan pada giliran berikutnya Indonesia akan sampai pada tahapan yang lebih dinamis yaitu tahap dimana momentum pembangunan kembali diraih sehingga perwujudan tujuan pembangunan nasional akan dapat dicapai sesuai dengan cita – cita yang telah digariskan.

Salah satu jalan keluar yang dirintis untuk menghindari terjadinya pengulangan terhadap krisis serupa di kemudian hari adalah di hadirkannya perubahan dalam menentukan arah dan paradigma pembangunan kedepan. Perubahan paradigma pembangunan tampaknya harus dilakukan mengingat setelah krisis ekonomi yang melanda banyak kawasan di Asia Timur termasuk di Indonesia, tatanan kebijakan pembangunan ekonomi global banyak negara mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Untuk tetap eksis dalam percaturan dan dinamika globalisasi tentu butuh penataan dan pembaruan termasuk didalamnya unsur strategi dan kebijakan pembangunan nasional. Pertimbangan lainnya adalah merebaknya fenomena globalisasi yang dengan sangat cepat mempengaruhi pola dan interaksi ekonomi antar kawasan maupun negara. Interaksi ekonomi antar kawasan dan antar negara sebagai bagian terpenting dari globalisasi tampaknya mengharuskan adanya proses penyesuaian terutama yang terkait dengan kesesuaian strategi dan kebijakan pembangunan.

Bagi Indonesia, perubahan paradigma pembangunan nasional (dengan konten dan komposisi utamanya pembangunan ekonomi, politik, sosial, kelembagaan dan pemerintahan) dihadirkan dalam wujud merumuskan visi dan misi pembangunan nasional jangka panjang dengan durasi waktu 25 tahun hingga 30 tahun ke depan. dalam menyikapi kemudian pada tahapan berikutnya diikuti dengan dari krisis dari upaya untuk mengatasi berbagai dampak negatif krisis ekonomi tersebut diantaranya adalah dimulai dari peninjauan kembali terhadap rumusan dan kerangka dasar strategi pembangunan yang pernah diterapkan pada masa lalu dengan berbagai implikasi yang ditimbulkannya.

II. PEMBAHASAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi pembangunan yang diterapkan (paling tidak dalam tataran politik perencanaan pembangunan) adalah strategi pembangunan yang mengkombinasikan pembangunan sektor pertanian dan sektor – sektor lain (terutama) sektor industri yang menunjang pembangunan sektor pertanian. Penjabaran dari strategi ini tentu akan berkaitan dengan upaya bagaimana agar sektor – sektor penunjang terutama sektor industri harus dikembangkan terlebih dahulu atau paling tidak sejalan dengan pembangunan sektor pertanian. Dari sisi teoritis, Indonesia dapat saja disebut sebagai negara yang menganut strategi pembangunan tidak berimbang (*unbanced growth strategy*), yang kemudian dapat bergeser menuju strategi pembangunan berimbang (*balanced growth strategy*), walaupun secara ilmiah pemahaman seperti ini masih sangat mungkin untuk diperdebatkan (*debatable*).

Kelengkapan lain yang sangat dibutuhkan untuk menyukseskan strategi ini adalah mengimplementasikan konsep trilogi pembangunan dan konsep delapan jalur pemerataan yang pada waktu itu dianggap merupakan ikon terpenting dalam mendistribusikan hasil – hasil pembangunan (terutama hasil – hasil pembangunan ekonomi dan sosial) kepada masyarakat.

Model pembangunan era orde baru diterapkan dengan landasan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, utang luar negeri (pinjaman), proteksi pada sektor industri atau lebih mengarah pada *inward looking strategy* walaupun ekspor dianggap sebagai komponen perdagangan luar negeri untuk menghasilkan devisa, pengembangan infrastruktur dasar, sektor kelembagaan dengan dominasi pemerintah pusat yang semakin kuat, orientasi produksi, iklim demokratisasi yang lebih menonjolkan pada aspek peran kekuasaan negara dan pemerintah yang berujung pada pemantapan stabilitas keamanan dan politik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil bersih dari strategi pembangunan yang berbasis pada pembangunan sektor pertanian dengan dukungan sektor industri dengan model seperti yang dikembangkan oleh pemerintah orde baru ternyata tidak saling menguntungkan (terutama dilihat dari sisi kemajuan pembangunan sektor pertanian dan sektor industri). Justru dalam kenyataannya sektor industri dengan karakter padat modal, padat sumberdaya dan semakin bernuansa padat teknologi dan kurang berpihak pada penyerapan tenaga kerja menjadi semakin berkembang dan dominan. Sementara itu, sektor pertanian diklaim pihak, tetap tidak mampu bangkit dan relatif stagnan pertumbuhannya.

Dengan demikian terjadi dualisme kembali dalam kanvas strategi pembangunan di Indonesia yang telah dikenal selama ini sebagai dualisme sektor modern dan sektor tradisonal. Walaupun dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sangat menggembirakan, Indonesia bersama dengan negara – negara Asia Timur lainnya dikenal dengan sebutan keajaiban dari Asia Timur (East Asian Miracle), sebutan tersebut muncul sebagai bentuk dari apresiasi negara – negara lain terhadap pertumbuhan ekonomi kedelapan negara tersebut yang dinilai sangat dramatis selama lebih dari tiga dekade. Bahkan empat negara Asia Timur yaitu Hongkong, Korea Selatan, taiwan dan Singapura mendapat julukan sebagai The Four Tigers karena dinilai memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi performa ekonomi dunia (Sjamsul Arifin, 2008).

Prestasi yang sangat menggembirakan dalam pencapaian laju pertumbuhan ekonomi selama tiga dekade tersebut ternyata tidak mengurangi kegagalan Indonesia dalam melaksanakan dan mendistribusikan hasil – hasil pembangunan, dan Indonesia dianggap telah gagal dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf hidup masyarakatnya.

Dalam merumuskan visi Indonesia 2005 – 2025, pada dasarnya telah diperhitungkan beberapa faktor

fundamenta baik yang bersifat eksternal maupun internal, diantaranya: adalah : A. Faktor eksternal meliputi : 1. perkembangan dan dinamika globalisasi ekonomi 2. gejolak dan fluktuasi perekonomian dunia 3. perubahan dalam geo – strategi, geo – politik dan geo – sekuriti terutama yang terkait dengan peran strategis kekuatan – kekuatan global yang bercokol pada banyak kawasan yang dapat menimbulkan potensi konflik sekaligus potensi stabilitas. B. Faktor internal antara lain mencakup : 1. perkembangan jumlah penduduk termasuk persebarannya. 2. letak geografis dan kondisi topografi. 3. ketersediaan SDA dan potensi yang masih dimiliki. 4. Kualitas sumberdaya manusia. 5. dinamika sosial budaya yang berkembang setelah era reformasi. 6. dinamika otonomi daerah 7. budaya politik dan demokratisasi pada berbagai stratifikasi sosial 8. kondisi birokrat dan kaulitas birokrasi. 9. kualitas kelembagaan formal dan informal. 10. kemampuan untuk memanfaatkan dan mensinergiskan modal sosial, modal manusia dan modal kelembagaan 11. ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur pembangunan baik yang bersifat hardware infrastructure, software infrastructure maupun institutional infrastucture. 12. kualitas kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan dan, 13. mobilitas penduduk dan sumberdaya antar wilayah.

Dalam mengimplementasikan visi – misi tersebut, pemerintah telah menetapkan kerangka dasar pembangunan jangka panjang dengan menuangkannya pada tahapan pembangunan jangka menengah termasuk penekanan pada skala prioritas pembangunan. Adapun tahapan dimaksud adalah sebagai berikut : a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ke -1) kurun waktu 2005 – 2009. Pada periode ini pelaksanaan pembangunan akan diarahkan pada upaya menata kembali pembangunan Indonesia disegala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, yang tingkat kesejahteraan rakyatnya semakin meningkat. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ke – 2) kurun waktu 2010 – 2014.

Keberlanjutan pembangunan pada RPJM ke – 2 ditujukan pada upaya pemantapan dalam kaitannya dengan penataan kembali Indonesia sebagaimana yang telah di lakukan pada RPJM ke – 1, adapun yang menjadi prioritas utama dalam pemantapan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan pembangunan sektor pendidikan sebagai dinamisatornya, dari hasil pembangunan sumberdaya manusia ini diharapkan mulai tumbuh dinamika daya saing nasional. Pada tahap berikutnya pemerintah juga akan mencanangkan dan mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM ke - 3) kurun waktu 2015 – 2019, sebagai kelanjutan dari RPJM ke – 2, maka dalam RPJM ke – 3 ini arah pembangunan masih ditujukan untuk semakin memperkuat pencapaian hasil dalam pembangunan sebagaimana yang telah diperoleh dalam RPJM ke 2, dengan arah penekanan pada upaya meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan daya saing bangsa yang akan dibangun berdasarkan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke – 4 (2020 – 2024), arah dan tujuan pembangunan telah mendekati pada perwujudan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pada upaya menciptakan dan mewujudkan struktur perekonomian yang lebih berimbang, kokoh, yang didukung oleh meningkatnya daya saing perekonomian di berbagai wilayah. (Undang – Undang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, UU RI No.17 Th 2007).

Banyak wacana yang muncul sehubungan dengan perumusan visi misi pembangunan nasional Indonesia kedepan. Hal ini menandakan keinginan untuk melaksanakan dan memelihara momentum pembangunan tetap merupakan tekad dari sebagian besar

warga masyarakat. Ide tentang pembangunan Indonesia kedepan yang diikuti dengan tujuan yang hendak dicapai tidak hanya di kemukakan oleh pemerintah tapi segmen masyarakat lainnya pun juga memberikan konsep tentang visi Indonesia kedepan. Adalah Yayasan Indonesia Forum yang mengemukakan bahwa Indonesia kedepan, tepatnya Indonesia di tahun 2030 merupakan *Negara Maju yang unggul dalam pengelolaan kekayaan alam*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia di tahun 2030 memiliki 4 obsesi besar yaitu : 1. Masuknya Indonesia dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia, dengan pendapatan perkapita sekitar US \$ 18 ribu dan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa. 2. terwujudnya pemanfaatan SDA yang berkelanjutan, antara lain masuk dalam 10 besar tujuan pariwisata dunia dan tercapainya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan energi domestik. 3. terwujudnya kualitas hidup modern yang merata antara lain ditandai dengan masuknya Indonesia dalam 30 besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik didunia. 4. Masuknya paling sedikit 30 perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune 500 Companies (Yayasan Indonesia Forum, 2007).

Optimisme Yayasan Indonesia Forum (YIF) sesungguhnya bermula dari keyakinan bahwa persoalan – persoalan yang dihadapi oleh Indonesia pasca krisis multidimensional telah dapat ditangani atau diatasi secara konseptual dan rasional.

Persoalan – persoalan mendasar seperti dampak negatif krisis ekonomi dan moneter, rendahnya kinerja perekonomian, rendahnya daya saing, rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia, praktek – praktek penyalahgunaan kekuasaan dan hukum dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, rendahnya kualitas birokrasi dan kelembagaan pemerintah, kesenjangan pembangunan antar wilayah, merosotnya kualitas ekosistem (degradasi ekosistem), merebaknya kesenjangan sosial dan tingkat frustrasi masyarakat, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan dan setumpuk masalah – masalah fundamental lainnya pada dasarnya masih menghiasi nuansa kehidupan ekonomi, politik dan sosial dan masih menjadi bagian dari problema fundamental bangsa.

Pada dasarnya pencapaian visi misi Indonesia, oleh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (SBY – JK) dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (SBY – Boediono) tidak memberikan batasan yang jelas tentang strategi pembangunan jangka panjang. Hal ini dapat dimaklumi karena titik berat penanganan masalah pembangunan akan dilakukan secara spesifik dengan durasi waktu jangka pendek, padahal dimensi masalah yang muncul tidak selalu dapat dikategorikan jangka pendek dan malahan perspektif penanganannya memakan waktu

yang cukup lama., misalnya masalah kemiskinan, ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengangguran, dan pengembangan sumberdaya manusia serta sederet masalah lainnya yang sangat kompleks.

Kerangka pemulihan ekonomi domestik yang telah dirumuskan sejak kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini pada dasarnya bertujuan untuk 1. memberikan arah yang jelas terhadap upaya – upaya restrukturisasi ekonomi dan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 2. memberikan arahan terhadap pemilihan strategi dan kebijakan yang dianggap lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam era pasca krisis. 3. merumuskan dan mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. 4. memberikan arahan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial dapat bersinergis dan sesuai dengan kapasitas sumberdaya. 5. memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk meningkatkan kapabilitasnya sesuai dengan norma – norma demokrasi, pemberdayaan ekonomi dan modal sosial yang miliki.

Dalam kerangka pembangunan jangka pendek dan jangka menengah mulai era 2004 – 2009 serta era 2010 – 2014, ada penegasan bahwa untuk menata kembali fondasi dasar

pembangunan ekonomi yang porak poranda akibatnya terjangan krisis ekonomi dan krisis multi dimensional serta terakhir krisis finansial global, pemerintrah tampaknya tertarik pada membangun kembali sektor pertanian. Selanjutnya pendekatan yang ditempuh ini disebut dengan Strategi Revitalisasi Sektor Pertanian (SRSP). Dalam spektrum strategi pembangunan ekonomi, mengkedepankan peran pembangunan pertanian dalam kaitannya dengan upaya untuk mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebenarnya masuk dalam lingkup strategi Industrialisasi yang ditopang oleh Pembangunan Sektor Pertanian atau Agriculture Development Led of Industrialization (ADLI) yang pernah diperkenalkan dipopulerkan oleh Mellor dan Mosher di paruh awal dasawarsa 50 – an. Argumentasi yang dibangun oleh Kabinet Indonesia bersatu Jilid I dan Jilid II sebenarnya sederhana saja yakni sektor pertanian merupakan satu – satunya sektor yang telah teruji ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi, sebagian besar warga masyarakat bekerja dan menggantungkan kehidupan ekonomi dan sosialnya pada sektor pertanian, dan sebagian besar masalah pembangunan ekonomi bangsa terutama yang terkait dengan

kemiskinan berada disektor pertanian, oleh karenanya keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian secara keseluruhan akan berdampak positif dalam mengatsi masalah – masalah fundamental ekonomi dan sosial lainnya dan begitu pula sebaliknya.

Strategi Revitalisasi Sektor Pertanian mencakup beberapa aspek penting diantaranya adalah : 1. peningkatan ketahanan pangan ; 2. pengembangan agribisnis ; 3. peningkatan kesejahteraan petani ; 4. pengembangan sumberdaya perikanan ; 5. pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan. Selain itu masih terdapat juga 12 program yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan revitalisasi pertanian seperti keamanan dalam negeri, kerjasama perdagangan internasional, pengembangan ekspor, sistem pendukung usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), penataan ruang, pengembangan kelembagaan keuangan, ekonomi lokal, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, serta pengelolaan cadangan irigasi (Bustanul Arifin, 2005). Inti dari Strategi Revitalisasi Sektor Pertanian (SRSP) pada dasarnya adalah pembangunan mega sektor agribisnis dan agroindustri guna mendukung kemajuan dan daya saing ekonomi bangsa.

Secara teoritik dan empirik, Strategi Revitalisasi Sektor Pertanian dalam implementasinya dipadukan dengan Triple Track Strategy (TTS) yang dijadikan platform utama strategi pembangunan yang belakangan ini

Triple Track Strategy mengalami metamorfosis menjadi *Four Track Strategy* dengan menambahkan unsur pro – environment (berpihak pada lingkungan), namun bagaimanapun juga menurut hematnya dengan semakin mendalamnya persoalan dasar yang di hadapi Indonesia, kiranya amat patut dipertimbangkan penambahan parameter daya saing (pro – competitiveness) dan parameter pemberdayaan ekonomi rakyat (people empowerment economy), sehingga dari 4 jalur (track) yang ada dapat diperluas menjadi Strategi Enam Jalur (*Six Track Strategy*).

Untuk dapat merealisasi visi misi pembangunan nasional 2025 – 2030, strategi pembangunan yang dipilih dan diterapkan tentu harus mengacu pada kolaborasi antara strategi pembangunan konvensional dan strategi pembangunan yang mengandung kontens ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sama sekali tidak dapat dihindari mengingat di tahun 2030, Indonesia menginginkan dirinya menjadi negara maju yang dibekali dengan keunggulan kompetitif dan daya saing tinggi. Kondisi ini tidak dapat dicapai manakala selalu terjadi pengabaian terhadap pembangunan manusia yang bertumpu pada pembangunan sektor pendidikan untuk menghasilkan penguasaan ilmu dan teknologi tetap berlangsung.

Dalam bahasa globalisasi, pendekatan ini disebut *knowledge based economy* atau *grand techno economic strategy*. Knowledge Based Economy adalah ekonomi yang berbasis langsung pada produksi, distribusi dan penggunaan knowledge dan informasi. Selanjutnya menurut OECD (1996) dalam Sampurno (2007), dikatakan bahwa *.....one in which the generation and exploitation of knowledge has come to play the predominant part in the creation of wealth. It is not simply about pushing back the frontier of knowledge, it also about the more effective use and exploitation of all types of knowledge in all manner of economic activity.*

Sama halnya dengan knowledge based economy, pemahaman tentang grand techno economic strategy – pun pada dasarnya dilandasi pada 3 pilar utama yaitu pilar penguasaan teknologi, pilar produktivitas, dan pilar daya saing. Jadi prinsip dasar grand techno-economic dan knowledge based economy sama sekali tidak memiliki perbedaan yang bersifat substansial, kedua – keduanya tetap menganggap bahwa motor kemajuan ekonomi pada dasarnya terletak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Aroef dan Djamil, 2009).

Untuk tantangan global, Dwijowijoto (2001) mengemukakan adanya the Pentagon Trap (Perangkap Pentagon) atau jebakan segi lima yang berintikan aspek liberalisasi perdagangan dan investasi dunia, demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan hak paten

Jebakan segi lima ini dengan sengaja dirancang oleh negara maju - khusus Amerika Serikat – agar negara miskin atau negara berkembang tetap dalam kondisi yang stagnan dan tetap menjadi atau bagian pinggiran yang tetap bergantung pada negara maju dan negara kaya. Dalam kenyataannya, jebakan segilima ini tampaknya sudah merupakan bagian dari fenomena globalisasi yang akibatnya telah dirasakan oleh hampir seluruh negara didunia.

III. KESIMPULAN

Dari uraian sebagaimana telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk mencapai visi misi pembangunan nasional 2025 atau 2030 diperlukan re – desain atau re – orientasi strategi pembangunan secara lugas, konkrit dan komprehensif. Alternatif strategi pembangunan yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diikuti dengan penguasaan teknologi guna membangun dan memiliki daya saing global bukanlah merupakan pilihan mutlak, namun desain kebijakan atau strategi pembangunan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya yang optimal dengan dukungan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi dan penguatan daya saing global suatu bangsa setidaknya – tidaknya akan memberikan keyakinan yang lebih kuat dalam merintis jalan untuk tercapainya visi misi pembangunan Indonesia 2025 atau 2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007., *Undang – Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (UU RI No.17 Th.2007)*. Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- , 1994., *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam 1994/95 – 1998/99 Buku I*.
- Arifin Bustanul, 2005. *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. Penerbit Grasindo, Cetakan Pertama, Jakarta
- Arifin Sjamsul, 2008., *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis*. Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Cetakan Pertama, Jakarta.
- Aroef Matthias dan Jusman Syafii Djamal, 2009., *Grand Techno – Economic Strategy Siasat memicu Produktivitas Untuk Memenangkan Persaingan Global* Editor Hatim Ilwan, Penerbit Mizan, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Dwijowijoto Riant Nugroho, 2001., *Reinventing Indonesia Menata Ulang Manajemen Pemerintahan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global* . Penerbit Gramedia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Sampurno, 2007., *Knowledge – Based Economy : Sumber Keunggulan Daya Saing Bangsa*. Penerbit Pustaka pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta.